

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Jepara

9

Agustiyana Lailatus Sholikhah¹, Hadi Sasana², Nuwun Priyono³
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
E-Mail : agustiyanalaila18@gmail.com¹, hadisasana@live.undip.ac.id²,
nuwunpriyono@untidar.ac.id³

Submitted:
NOVEMBER 2022

Accepted:
FEBRUARI 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of village government organizational commitment, internal control system, and the use of information technology on village financial management accountability (empirical study in villages throughout Jepara Regency). The research method used is a quantitative research method with primary data obtained from questionnaires measured using a Likert scale. The population in this study were villages in the local government area of Jepara Regency, totaling 184 villages from 16 sub-districts. The sampling method in this study was using probability sampling in the form of simple random sampling. Determination of the number of samples in this study was carried out using a statistical method in the form of the Slovin formula. The results of this study state that partially the organizational commitment of the village government does not affect the accountability of village financial management, partially the internal control system has a positive effect on the accountability of village financial management, partially the use of information technology has an effect on positive to the accountability of village financial management, and simultaneously the commitment of village government organizations to the internal control system, and the use of information technology have a positive effect on village financial management accountability.

Keywords: Village Government Organizational Commitment, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Village Financial Management Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi empiris pada desa se-Kabupaten Jepara). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer diperoleh dari kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Jepara yang berjumlah 184 desa dari 16 kecamatan. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probabilitas sampling berupa simple random sampling. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik berupa rumus Slovin. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan secara

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 11 No. 1, 2023
pg. 9-20
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v11i1.1486

parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan secara simultan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: komitmen organisasi pemerintahan desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah titik awal sebuah desa secara mandiri memperoleh kewenangan, menentukan posisi dan peran dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, mulai pada tahun 2015 dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah menggulirkan dana untuk desa sebagai wujud dari desentralisasi. Akibatnya, selain memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atas keuangan desa, pemerintah desa juga harus bertanggung jawab penuh atas dana yang diterima baik dari pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat setiap tahun telah mengalokasikan sejumlah besar dana untuk desa-desa di Indonesia. Jumlah anggaran Dana Desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat mengalami peningkatan secara terus menerus. Seiring adanya peningkatan tersebut, rata-rata penerimaan dana desa untuk setiap desa juga ikut meningkat. Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat di tahun 2015 adalah sebesar Rp 20.760.000.000.000 untuk 74.093 desa dengan penerimaan mencapai Rp 280.000.000 bagi rata-rata setiap desa. Bukti peningkatan penerimaan dana desa terjadi setiap tahun hingga pada tahun 2021 rata-rata setiap desa memperoleh dana desa mencapai Rp 961.000.000 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 72.000.000.000.000 untuk 74.961 desa (Adriyanto, 2021). Namun, pada tahun 2022 pagu dana desa mengalami penurunan empat triliun rupiah.

Adanya penerimaan dana desa yang terus meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan dana desa. Permasalahan baru yang muncul atas peningkatan dana desa tersebut yaitu menimbulkan kekhawatiran oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa karena banyak terjadi kasus penyelewengan atas dana desa berupa korupsi oleh perangkat desa itu sendiri. Berdasarkan kajian dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* (2018), dinyatakan bahwa anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan untuk dikorupsi. Hal ini terbukti bahwa banyak terjadi kasus korupsi dana desa di Indonesia dari sejak awal digelontorkannya dana desa yaitu tahun 2015 hingga sekarang. Kasus korupsi dana desa sejak 2015 sampai 2020 telah tercatat terdakwa kasus korupsi dana desa sejumlah 676 dengan total kerugian negara 111 Miliar. Sementara di tahun 2021 semester I, pemerintah desa merupakan pelaku kasus korupsi terbesar dengan tercatatnya 62 kasus korupsi dana desa (Mahriadi et al., 2021).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masing-masing kabupatennya memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) berbeda-beda setiap tahun. Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Nilai IDM Kabupaten Jepara selama tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari 0,6904 menjadi 0,6927, namun ranking yang diperoleh tidak semakin meningkat melainkan menurun dan tetap pada status IDM Kabupaten “Berkembang”. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan di Kabupaten Jepara terkait indikator yang dikembangkan dalam IDM atas dasar aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks desa membangun memusatkan ketepatan intervensi kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah atas dasar partisipasi masyarakat yang melakukan korelasi

dengan karakteristik wilayah desa mencakup tipologi dan modal sosial (kemendes.go.id, 2022). Adanya dukungan dana desa dan pendamping desa maka IDM memotret perkembangan kemandirian desa sesuai penerapan undang-undang desa.

Kabupaten Jepara termasuk salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Desa maupun pemerintah Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa. Secara administratif Kabupaten Jepara terdiri atas 16 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 184 desa. Dana desa yang diterima oleh Kabupaten Jepara setiap tahunnya selalu meningkat dan cukup besar. Adapun anggaran dana desa Kabupaten Jepara sejak awal diadakannya program dana desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kabupaten Jepara

Tahun	Total Anggaran
2015	Rp 55.540.072.000
2016	Rp 124.699.832.000
2017	Rp 158.765.096.000
2018	Rp 191.881.485.000
2019	Rp 234.090.663.000
2020	Rp 247.118.045.000
2021	Rp 250.171.633.000
2022	Rp 245.690.000.000

Sumber: kemenkeu.go.id (Data Diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten Jepara setiap tahun meningkat. Meskipun pada tahun 2022 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jepara menurun, namun pemerintah desa diharapkan tetap mengelola dana yang diterima dengan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku. Munculnya harapan tersebut karena pada tahun-tahun sebelumnya terdapat penyelewengan dana yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Jepara. Data penyelewengan tersebut meliputi, tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Jepara menemukan sedikitnya tujuh desa yang bermasalah dalam hal keuangan (murianews.com, 2016). Pada tahun 2017 sampai 2018 terdapat oknum yang melakukan korupsi uang APBDes mencapai Rp 100 Juta yang dilakukan oleh Kepala Desa Mindahan (radarkudus.jawapos.com, 2022). Selain itu, tim Inspektorat Kabupaten Jepara juga menemukan kasus penyelewengan dan kegagalan penggunaan APBDes di tahun 2019 khususnya di Desa Kaliombo. Temuan tersebut yaitu adanya pengeluaran untuk beberapa kegiatan namun tidak disertakan bukti pendukung yang sah dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan juga ditemukannya SPJ fiktif atas pengelolaan keuangan yang melebihi ketentuan sehingga hal ini merugikan negara (tabloidskandal.com, 2020). Pada awal tahun 2022 yaitu bulan Januari baru ada 20% desa yang telah menyelesaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang LPJ realisasi APBDes tahun anggaran 2021, sementara 80% desa belum merampungkannya (jepara.go.id, 2022). Padahal LPJ APBDes adalah salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu objek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan merupakan amanat yang wajib diselesaikan. Berdasarkan tuntutan kepada pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa, hal tersebut memberikan arti bahwa masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Jepara.

Tuntutan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi fokus penting untuk pemerintah desa karena menunjukkan sebuah keberhasilan atas pencapaian visi dari undang-undang desa dalam rangka perwujudan desa menjadi maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis serta mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam mencapai masyarakat desa sejahtera (Dewi & Gayatri, 2019). Terdapat banyak faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diantaranya komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi (Kasmini & Dewi (2021); Puspa & Prasetyo (2020); Aziiz & Prastiti (2019)). Banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang faktor yang

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa membuktikan hal tersebut. Selain itu, penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini masih sangat layak sebagai bahan penelitian karena program dana desa baru beberapa tahun terakhir dijalankan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa jawaban responden atas kuesioner yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yaitu kepala desa, dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yaitu sekretaris desa, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, serta kepala urusan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di wilayah Kabupaten Jepara yang berjumlah 184 desa dari 16 kecamatan yang ada. Metode penyampelan pada penelitian ini adalah menggunakan *probability sampling* berupa *simple random sampling* dengan penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yang dihitung menggunakan rumus ukuran sampel slovin. Berikut rumus slovin menurut Chandrarini (2018) untuk menentukan sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2} = \frac{184}{1 + 184(0,1)^2} = 64,78 \text{ dibulatkan menjadi } 65 \text{ Desa.}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin dengan batas toleransi ketidakteelitian ditentukan sebesar 10% (0,1) diperoleh sampel sebanyak 65 desa. Dari 65 desa tersebut berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Jepara kecuali Kecamatan Karimunjawa. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses atas jarak yang ditempuh oleh peneliti untuk menuju Kecamatan Karimunjawa tersebut. Jumlah responden yang ditentukan pada penelitian ini sejumlah 520 responden dari 65 desa dengan masing-masing desa diwakili oleh 8 responden selaku pengelola keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden dengan menggunakan skala *likert*. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (Uji F), dan uji signifikansi parsial (Uji t). Adapun persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$APKD = \alpha + \beta_1 \text{ KOPD} + \beta_2 \text{ SPI} + \beta_3 \text{ PTI} + \varepsilon$$

Keterangan:

APKD = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

KOPD = Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

SPI = Sistem Pengendalian Internal

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jumlah kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti adalah sebanyak 520 kuesioner kepada 65 desa dari 184 desa yang ada di Kabupaten Jepara. Namun, tidak semua kuesioner tersebut diikutsertakan dalam pengolahan data dan analisis penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa kuesioner yang tidak diserahkan kembali kepada peneliti. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk tingkat pengembalian kuesioner tersebut:

Tabel 2. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	520	100%
Kuesioner yang tidak kembali	45	8,7%
Kuesioner yang Kembali	475	91,35%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 2. di atas, menunjukkan bahwa dari 520 kuesioner yang disebar terdapat 475 kuesioner yang kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 91,3% yang dapat diolah, dan sejumlah 45 kuesioner tidak kembali.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KOPD	475	20	30	26,68	2,299
SPI	475	64	90	80,48	6,004
PTI	475	16	30	26,97	2,409
APKD	475	28	50	44,82	3,793
Valid N (listwise)	475				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan Tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa jumlah n atau responden adalah 475 orang. Hasil pengujian statistik deskriptif yang pertama, menyatakan bahwa untuk variabel KOPD (Komitmen Organisasi Pemerintah Desa) memiliki nilai minimum atau skor terendah 20 dan nilai maksimum atau skor tertinggi sebesar 30 sehingga menghasilkan rata-rata nilai sebesar 26,68 dengan standar deviasi sebesar 2,299. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya komitmen organisasi pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian statistik deskriptif yang kedua, menyatakan bahwa untuk variabel SPI (Sistem Pengendalian Internal) memiliki nilai minimum atau skor terendah 64 dan nilai maksimum atau skor tertinggi sebesar 90. Sehingga memberikan hasil rata-rata nilai sebesar 80,48 dengan standar deviasi sebesar 6,044. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian statistik deskriptif yang ketiga, menyatakan bahwa untuk variabel PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) memiliki nilai minimum atau skor terendah 16 dan nilai maksimum atau skor tertinggi sebesar 30. Sehingga memberikan hasil rata-rata nilai sebesar 26,97 dengan standar deviasi sebesar 2,409. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian statistik deskriptif yang keempat, menyatakan bahwa untuk variabel APKD (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) memiliki nilai minimum atau skor terendah 28 dan nilai maksimum atau skor tertinggi 50. Sehingga memberikan hasil rata-rata nilai sebesar 44,82 dengan standar deviasi sebesar 3,793. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata responden menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam instansinya adalah baik.

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengukur kualitas data sehingga dapat dipastikan layak untuk diproses dalam pengujian selanjutnya. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized* terlihat bahwa sebaran titik-titik tersebut relatif dekat pada garis lurus. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa data (residual) terdistribusi secara normal. Hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel kurang dari 10. Hal ini dibuktikan dengan nilai VIF variabel KOPD (Komitmen Organisasi Pemerintah Desa) sebesar 1,886, SPI (Sistem Pengendalian Internal) sebesar 2,404, dan PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) sebesar 1,853. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Kemudian Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel

memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 dimana KOPD (Komitmen Organisasi Pemerintah Desa) memiliki nilai 0,495, SPI (Sistem Pengendalian Internal) memiliki nilai 0,754, dan PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) memiliki nilai 0,547. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Berikut hasil uji regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS 25:

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandarized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	2,877	1,455
KOPD	0,040	0,062
SPI	0,362	0,027
PTI	0,434	0,059

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$APKD = 2,877 + 0,040 \text{ KOPD} + 0,362 \text{ SPI} + 0,434 \text{ PTI} + \varepsilon$$

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel bebas yang mampu menjelaskan variasi variabel terikat (Chandrarin, 2018).

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square
1	0,649

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan Tabel 7. di atas, menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) memiliki besaran 0,649. Hal ini membuktikan bahwa variabel KOPD (Komitmen Organisasi Pemerintah Desa), SPI (Sistem Pengendalian Internal), dan PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) memiliki proporsi pengaruh terhadap APKD (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) dengan persentase sebesar 64,9% sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 6. Uji F

	Tolerance	Sig.
Regression	290,137	0,000 ^b

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 (2022)

Uji t digunakan untuk membuktikan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 7. Uji t

Variabel	t	Sig.
KOPD	0,654	0,514
SPI	13,638	0,000
PTI	7,421	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 (2022)

Pembahasan

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *software* SPSS 25 memperoleh hasil bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu dengan nilai $0,654 < 1,96501$ dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,514. Oleh karena itu, **H₁ ditolak** dengan pernyataan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak memiliki dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan rata-

rata jawaban dari responden hal ini dikarenakan aparat desa memiliki pekerjaan lain diluar posisinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya tingkat kesetiaan dan komitmen aparat pada pemerintah desa. Selain itu, Astrina (2016) memberikan pernyataan bahwa komitmen organisasi aparat desa tidak memiliki pengaruh karena komitmen organisasi yang tinggi hanya meningkatkan kinerja pegawai, yang hanya berdampak pada produktifitas dan kreatifitas pagawai.

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah desa (*steward*) selaku pengelola keuangan desa harus memiliki tingkat komitmen yang tinggi kepada organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat (*principal*) secara baik dan totalitas. Pemerintah desa yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan berusaha menggunakan kemampuannya mencapai akuntabilitas seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, dikarenakan pada penelitian ini komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka terdapat indikasi bahwa perangkat desa belum mengupayakan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama (organisasi) melainkan masih mengutamakan kepentingan individu.

Pada kenyataannya hasil penelitian ini mengalami inkonsistensi dengan penelitian Suryani & Suprasto (2021), Kasmini & Dewi (2021), Mada et al. (2017) dan Hardiningsih et al. (2020) yang menyatakan komitmen organsiasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan harapan bahwa adanya komitmen organisasi pemerintah desa aparat desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa sehingga mampu menjalankan program kegiatan dengan baik. Namun, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto et al. (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *software* SPSS 25 memperoleh hasil bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu dengan nilai $13,638 > 1,96501$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,000$. Oleh karena itu, H_2 **diterima** dengan pernyataan bahwa sistem pengendalian intenal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik. Adanya implementasi sistem pengendalian internal membuat pemerintah desa melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset yang memadai sehingga organisasi memiliki keyakinan atas tercapainya tujuan organsiasi. Selain itu, adanya evaluasi dan perbaikan pengendalian internal melalui pengawasan inspektorat juga mampu mencapai peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan membuat pengelolaan keuangan desa dijalankan secara jujur dan taat terhadap aturan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik mengalami peningkatan. Bentuk pengendalian internal yang dilakukan berupa monitoring dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dengan sistem pengendalian internal tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa dapat diminimalisir bahkan tidak akan terjadi karena adanya prosedur yang harus dijalankan dalam pengelolaan keuangan desa, serta dinamika dana desa yang pengelolaannya diberikan kepada pemerintah desa akan mampu mencapai tujuannya untuk percepatan pembangunan di desa yang akhirnya kesejahteraan masyarakat desa akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa berkedudukan menjadi *steward* dan masyarakat berkedudukan menjadi *princial*. Pemerintah desa selaku *steward* merupakan lembaga yang bisa dipercaya serta bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dapat memfokuskan semua

kompetensi dan keahliannya pada pengendalian internal yang efektif untuk menciptakan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan baik kepada masyarakat.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Jepara dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari responden membuktikan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), Hasanah et al. (2020), Yesinia et al. (2018), dan Indriasih & Sulistyowati (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil perhitungan dengan *software* SPSS 25 memperoleh hasil bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu dengan nilai $7,421 > 1,96501$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,000$. Oleh karena itu, H_3 diterima dengan pernyataan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi sangat mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam proses pelaporan keuangan sehingga laporan *output* keuangan bisa tepat waktu, akurat, dan relevan dengan kondisi setempat, sehingga memungkinkan aparat desa memasukkan data lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Adanya keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data akan mengurangi terjadinya kesalahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa berkedudukan sebagai *steward* dan masyarakat berkedudukan sebagai *principal*. Apabila *steward* melakukan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal maka dalam melakukan pengelolaan keuangan desa akan lebih terbantu. Oleh karena itu, pemerintah desa akan lebih mudah menjalankan kewajibannya sebagai pelayan untuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adanya implementasi pemanfaatan teknologi informasi dapat sangat membantu untuk mengelola dana desa karena dapat memudahkan perangkat dalam mengolah dan melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*principal*) atas kegiatan yang dilakukan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Jepara dapat dikatakan cukup baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa rata-rata pemerintah desa telah menyediakan komputer maupun *software* pendukung (*microsoft excel, microsoft word* dll), akses internet yang memadai, dan *website* yang digunakan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa juga telah menerapkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk mempermudah pihak pengelola keuangan desa menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Marlina et al. (2021), Sugiarti & Yudianto (2017) dan Andika & Wati (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *software* SPSS 25 memperoleh hasil bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu dengan nilai $290,137 > 2,623757$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,000$. Oleh

karena, **H₄ diterima** dengan pernyataan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, membuktikan bahwa semakin baik komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik. Adanya komitmen organisasi diharapkan seseorang dapat memiliki pandangan yang positif dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian perangkat desa telah memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari organisasinya dan mempertahankan keanggotaannya sebagai bagian dari pemerintah desa karena sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam organisasi tersebut.

Hal ini juga didukung dengan adanya kontrol dari pemerintah maka kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa akan terawasi serta dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangannya. Adanya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi yang baik dan adanya pemantauan serta pengendalian internal maka secara langsung akuntabilitas dapat terwujud. Peran sistem pengendalian dalam hal ini sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi adanya tindakan kecurangan, penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa.

Komitmen organisasi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal akan lebih maksimal apabila dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi mempermudah aparat desa untuk mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa sudah memiliki peralatan komputer dan mendapatkan akses internet. Oleh karena itu, desa sudah memiliki *software* yang mendukung pekerjaan seperti *microsoft excel*, *microsoft word*, dan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan *website* desa yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti terkait program desa serta menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah yang lebih tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemerintah berkedudukan sebagai *steward* dan masyarakat berkedudukan sebagai *principal*. Apabila pemerintah desa memiliki komitmen organisasi yang kuat, implementasi sistem pengendalian internal yang baik dan benar, serta pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dan optimal maka dengan mudah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud. Wujud pertanggungjawaban ini baik kepada masyarakat maupun pemerintah atas. Semakin baik komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik dan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang komitmen organisasi pemerintah desa yang dilakukan oleh Mada et al. (2017), tentang sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), dan tentang pemanfaatan teknologi informasi Sugiarti & Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa masing-masing variabel tersebut berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

Komitmen organisasi pemerintah desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya komitmen organisasi pemerintah desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara.

Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh

pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan mengalami peningkatan.

Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Jepara maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan mengalami peningkatan.

Komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto. (2021). *Kebijakan Dana Desa 2021*. djpk.kemenkeu.go.id. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Algifari. (2015). *Statistika Deskriptif Plus* (Edisi Revi). UPP STIM YKPN.
- Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Kerambitan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(04), 340–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>
- Astrina, F. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (GCG) Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(01), 61–78.
- Astrini, D., & Puspitasari, R. (2022). The Impact of Financial Literacy and Financial Inclusion on the Performance of MSME in Bogor City. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 125-131.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Hardiningsih, P., Udin, U., Madsjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hasibuan, D. H. M., Amyar, F., & Hidayah, N. N. (2022). Government Audit Quality: Audit Expectation – Performance Gap. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(23), 373–386. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i23881>
- Hidayatulloh, T., & Amyar, F. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 171–180.
- Iriyadi, I., & Purba, J. H. V. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor Pendorong Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 529–544. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1557>
- Iriyadi, Setiawan, H., & Hadjidah, N. (2022). Analysis of Fundamental Factors to Improve the Performance of Hospitality and Tourism Companies: Case Study of Companies Listed on IDX Before and After COVID-19. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3),

- 25–35. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.3.3>
- Ihham, M., & Hayon, P. P. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Manajer Terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada Kantor Distrik dan Kampung-Kampung di Distrik Semangga Kabupaten Merauke). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 9(1), 62–73. <https://doi.org/10.35724/jies.v9i1.716>
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2018). *Lonjakan Korupsi di Desa*. <https://antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). The Role of Commitment , Competence , Internal Control system , Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 73–85. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Jepara.go.id. (2022). *LPJ APBDes Segera Rampung, Dana Desa Cair Bulan Ini*. www.Jepara.Go.Id. <https://jepara.go.id/2022/01/13/lpj-apbdes-segera-rampung-dana-desca-cair-bulan-ini/>
- Kasmini, K. L. S., & Dewi, N. A. W. T. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Barat). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 420–430. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36222>
- Kemendesa.go.id. (2022). *Indeks Desa Membangun (IDM)*. Idm.Kemendesa.Go.Id. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII(2), 324–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.254>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Murianews.com. (2016). *Keuangan 7 Desa di Jepara Ruwet*. www.Murianews.Com. <https://www.murianews.com/2016/08/09/90675/keuangan-7-desca-di-jepara-ruwet>
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). In *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Radarkudus.jawapos.com. (2022). *Ditetapkan Jadi Terdakwa, Mantan Kades di Jepara Kembalikan Uang Korupsi*. www.Radarkudus.Jawapos.Com. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/03/03/2022/ditetapkan-jadi-terdakwa-mantan-kades-di-jepara-kembalikan-uang-korupsi/>
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Sulistiawati, M., & Amyar, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 585-596.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan . *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580–590. <https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?page=3&id=6015144&view=documentsgs>
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011–2027. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>
- Tabloidskandal.com. (2020). *Warga Desa Kaliombo Seret Petinggi Desa Ke Ranah Hukum*. www.Tabloidskandal.Com. <https://www.tabloidskandal.com/lugas/warga-desa-kaliombo-seret-petinggi-desa-ke-ranah-hukum.html>
- Tofan, M., & Munawar, A. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 97–104. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1280>
- Wardana, I. (2016). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). In *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>